



PENETAPAN

Nomor 1594/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 32 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 48 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 1594/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 28 Februari 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung Nomor 157/07/VI/2010.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 6. Penetapan No. 1594/Pdt.G/2020/PA.Sor



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus bercerai di Pengadilan Agama Cimahi berdasarkan Putusan Nomor : 6949/Pdt.G/2018/PA.Cmi, yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Januari 2019.

4. Bahwa, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan berupa : Sebidang tanah diatasnya berdiri (Sertifikat Hak Milik) Nomor 01079 atas nama Yeni Herlina dan Irwan wahyu yang terletak di Kp. Ciluncat RT 001 RW 001 Desa Ciluncat Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Bapak Ade Sura
Sevelah Timur : Jalan Raya Gandasari
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Suhari
Sebelah Barat : SD Karangsetra

5. Bahwa harta kekayaan yang dijelaskan di posita 4 tersebut telah dijual setengahnya seluas 66,5 m2 kepada Ibu Lilis Lisnawati berdasarkan bukti kwitansi pembayaran, pada saat Penggugat masih berstatus suami isteri dengan Tergugat. Sehingga total sisa dari harta kekaayan tersebut seluas 66,5m2.

6. Bahwa pada saat ini harta kekayaan yang dijelaskan pada posita 4 di pegang oleh Penggugat, karena Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan ghaib dari desa Ciluncat dengan Nomor 474/193/II/DS/2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa pada tanggal 17 Februari 2020.

7. Bahwa selama perkawinan Tergugat banyak meninggalkan hutang kepada Orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana Penggunaan uang pinjaman tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangga, bahkan Penggugat sangat di rugikan atas perbuatan yang dilakukan Tergugat, karena Tergugat membebankan pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 6. Penetapan No. 1594/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat meminjam uang tersebut kepada beberapa jasa leasing dan perorangan, bahkan Tergugat beberap kali menyuruh orang untuk menagih hutang kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat sangat tidak nyaman akan hal itu, terlebih saat ini Penggugat tidak memiliki cukup uang untuk membayar hutang-hutang tersebut.

9. Bahwa harta kekayaan selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di jelaskan pada posita 4 oleh Penggugat akan di jual belikan untuk menutupi hutang piutang yang di tinggalkan Tergugat, sehingga perlu putusan dari majelis hakim untuk sebuah kepastian hukum dimana hak Penggugat tidak tercampur dengan hak Tergugat yang kedepannya tidak akan menimbulkan sebuah sengketa.

10. Bahwa terhadap harta kekayaan pada posita 4 karena diperoleh selama selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat merasa mempunyai hak atas sebagian harta tersebut, sehingga mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan untuk membagi dua sama rata, sama nilai dan bilamana tidak dapat dibagi secara riil agar dilakukan dengan jalan pelelangan dimuka umum.

11. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat untuk menanyakan status hutang piutang tersebut, namun Tergugat memang tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak ada itikad baik dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini demi melindungi hak Penggugat atas sebagian harta kekayaan tersebut.

12. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 35 ayat 1, pasal 37 serta dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Pasal 97.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6. Penetapan No. 1594/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah harta kekayaan yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada posita 4 adalah harta bersama;
3. Menetapkan bahwa bagian Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengiriskan orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relas panggilan Nomor 1594/Pdt.G/2020/PA.Sor Tergugat telah dipanggil secara rempi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Usaha damai tersebut berhasil, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya tersebut;

Halaman 4 dari 6. Penetapan No. 1594/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3132/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Saifuddin, S.H.I. dan Agus Firman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asep Dadan Hermawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M. Saifuddin, S.H.I.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA

Agus Firman, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Asep Dadan Hermawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	85.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Penggugat	: Rp.	10.000,00
5. Panggilan Tergugat	: Rp.	170.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	371.000,00